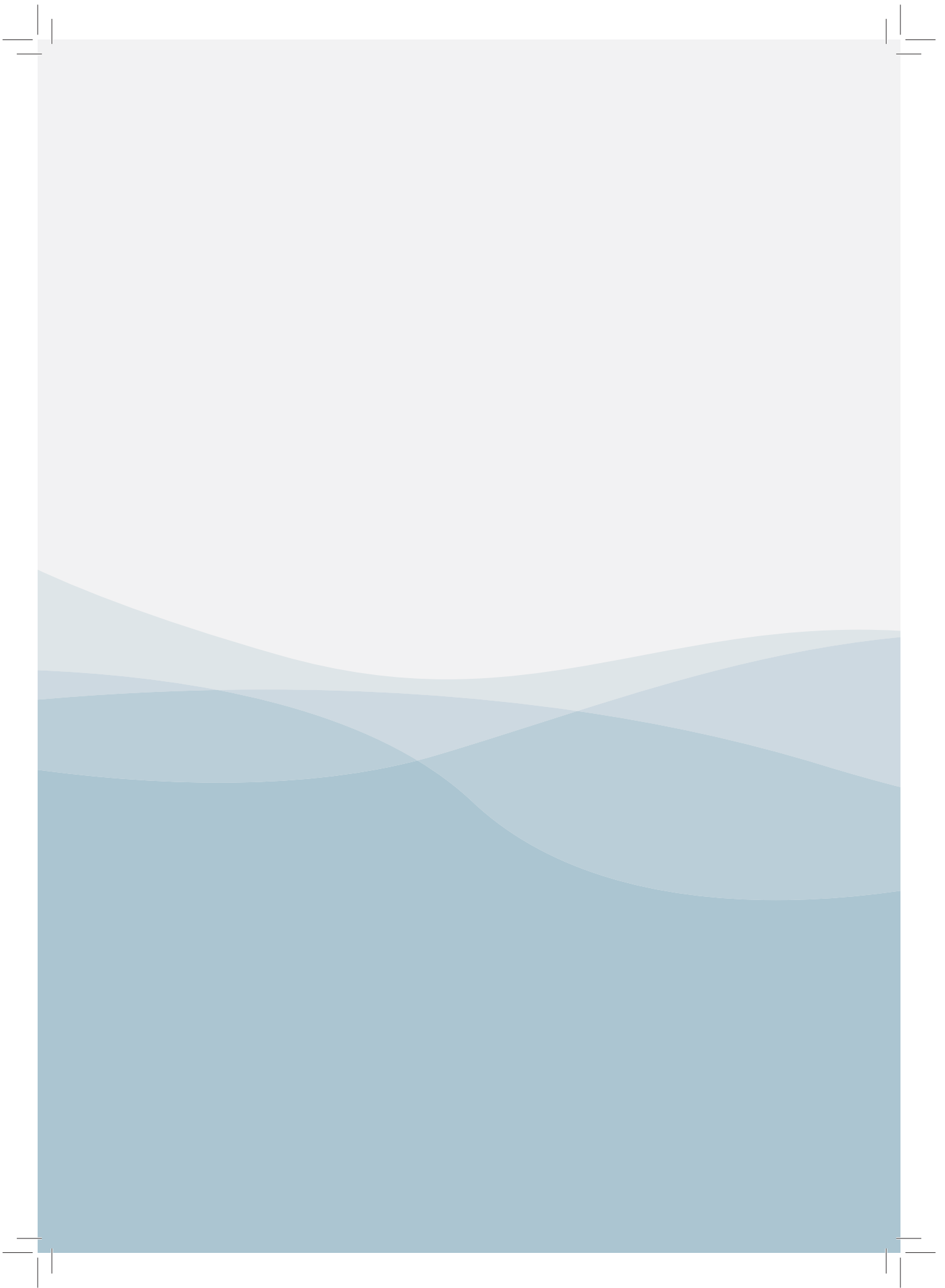


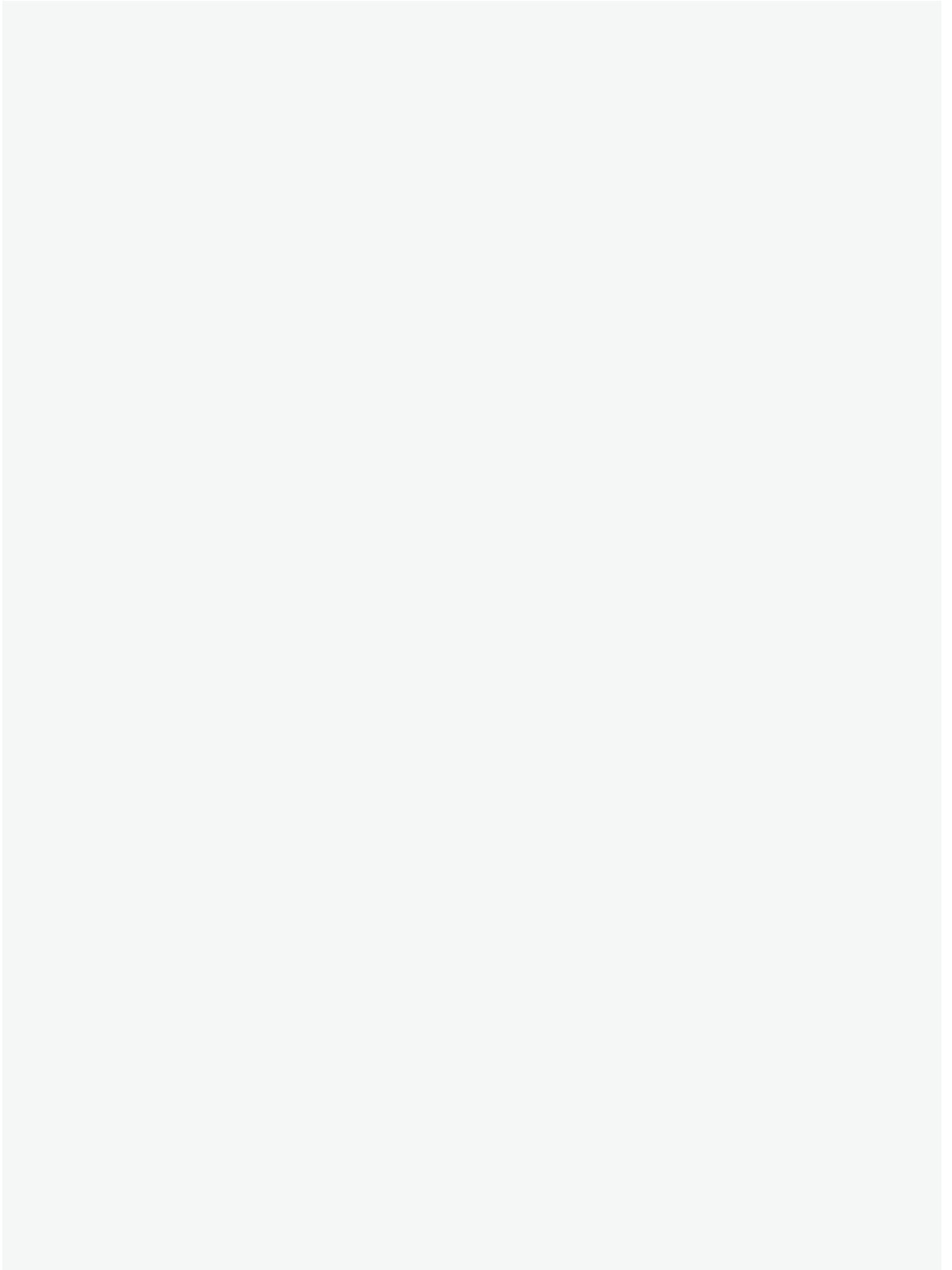
LAPORAN PUBLIK 2014





infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

LAPORAN PUBLIK 2014



DAFTAR ISI

vi	Kata Pengantar
viii	Lintasan INFID 2014
x	INFID dalam Angka
xii	Testimoni
xiv	Dewan Pengawas
xiv	Dewan Pengurus
xv	Sekretariat
1	BAB 1. PROFIL
1	A. Sejarah INFID
3	B. Analisa Konteks Program
6	BAB 2. PROGRAM INFID 2014
7	A. MDGs dan Post 2015 Development Agenda
14	B. Kemiskinan & Ketimpangan
20	C. HAM dan Demokrasi
26	D. Kegiatan Pendukung
28	BAB 3. LAPORAN KEUANGAN
28	A. Lembaga
29	B. Program
32	BAB 4. PENUTUP
33	LAMPIRAN
33	Daftar Kegiatan MDGs dan Post-2015 Development Agenda
34	Daftar Kegiatan Program Kemiskinan & Ketimpangan
36	Daftar Kegiatan Program HAM dan Demokrasi
37	Daftar Mitra Kerja INFID

Tahun 2014 adalah tahun politik, tahun yang ditandai dengan pergantian kepemimpinan politik nasional yang mengusung berbagai isu dan masalah yang belum diselesaikan oleh pemerintah terdahulu. Perdebatan mengenai isu dan masalah pembangunan, Hak Asasi Manusia, tata kelola pemerintahan dan aktor-aktor yang diharapkan menjadi nahkoda terus mengemuka di ruang publik selama 2014.

Perdebatan dan diskusi tersebut merupakan perkembangan yang sehat bagi demokrasi Indonesia. Di sanalah warga negara dari beragam latar belakang aktif memberikan kontribusi – pemikiran dan tindakan – agar Indonesia segera keluar dari berbagai himpitan masalah. Demokrasi tidak lagi didominasi oleh elit politik, aktivis ataupun organisasi masyarakat sipil, demokrasi dan dinamikanya sudah menjadi milik semua Warga Negara.

Bagi INFID, tahun 2014 adalah tahun konsolidasi dan pemantapan posisi dan peran lembaga. Pada tahun 2014, INFID telah mengadakan Konferensi dan Sidang Umum Anggota, yang menghadirkan semua anggota. Pada dirinya kegiatan ini cukup bersejarah, setelah terhenti selama 6 tahun. Pemantapan posisi dan peran INFID diwujudkan melalui sebagai kerja-kerja advokasi kebijakan dan kampanye di berbagai ruang sosial dan politik melalui 3 program utama lembaga yaitu: Ketimpangan, Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.

Selama 2014, telah banyak kegiatan dan produk advokasi dihasilkan oleh INFID. Selain Konferensi dan Sidang Umum Anggota, INFID juga berhasil menciptakan "tradisi baru" dengan kegiatan Konferensi Human Rights Cities yang didukung oleh 1 orang gubernur dan 6 Bupati/Walikota.

Kegiatan penting lainnya adalah *Side Event* Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang berlangsung di New York bekerjasama dengan UKP4, KUKPRI dan OSF. Selain konferensi, riset juga dilakukan INFID seperti Riset Indeks Barometer Sosial, Riset Partai Politik dan Ketimpangan, Akses Layanan Kesehatan di 6 Negara serta Riset Perlindungan HAM yang lebih kuat di ASEAN.

Pada akhirnya, Laporan Publik 2014 yang anda pegang ini adalah upaya pertanggungjawaban INFID kepada Publik. Sebuah laporan yang mencatat berbagai kegiatan, produk maupun pendanaan dan sumber pendanaannya. Semoga Laporan Publik ini bermanfaat bagi proses advokasi dan proses pembelajaran kita semua.

Jakarta, 23 Februari 2015

Sugeng Bahagijo
(Direktur Eksekutif)

Beka Ulung Hapsara
(Program Manajer)

LINTASAN INFID 2014





INFID DALAM ANGKA



29 tahun

Usia INFID pada tahun 2014



2004

Tahun ketika INFID memperoleh akreditasi status khusus dibawah ECOSOC PBB



70 anggota



3 program utama

HAM dan Demokrasi, Ketimpangan dan Pasca-2015



7 anggota

Badan Pengurus baru terpilih untuk periode 2014-2017



14 staff

Bekerja di sekretariat INFID



6.5 miliar

Anggaran tahun 2014



56 kegiatan selama 2014

Rata-rata empat kali kegiatan setiap bulan



1 kali konferensi

Human rights cities



1 kali konferensi INFID

Dan Sidang Umum INFID



3 memo kebijakan

Untuk calon Presiden baru Indonesia (Kebijakan Pajak, Ketimpangan dan Hak Asasi Manusia)



1 kali menyelenggarakan Side Event di New York,

Dalam rangka UN-General Assembly on Pasca-2015, bersama Open Society Foundation, Pemerintah Indonesia, ADA, Pemerintah Korea dan Beyond2015



1 kali menyelenggarakan survey Barometer Sosial,

untuk mengumpulkan suara warga tentang program pemerintah dan pelayanan publik



1 buah buku Ketimpangan di Indonesia



5000 lebih anggota facebook INFID
500 lebih follower di twitter



6 mitra kerja pemerintah

(UKP4, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah)



7 mitra pendukung dana

(Uni Eropa, Oxfam, Ford Foundation, Tifa Foundation, DnP, ICCO, Beyond2015, The Asia Foundation)



239.000 di hits di Google

(dengan kata kunci "INFID 2014", dilakukan pada jam 9.24, 14/02/2015)



6 mitra kerja jaringan CSO global

(International Forum on National NGO Platforms (IFP), Beyond2015, Open Government Partnership, Civil20-G20, ADN, ADA).



4 tugas sebagai Steering Committee jaringan CSO global

(International Forum on National NGO Platforms (IFP), Beyond2015, Open Government Partnership, Asia Development Alliance dan Asia Democracy Network (ADN).



25 kali INFID menjadi narasumber

Untuk tema Pasca-2015, Ketimpangan, dan HAM dan Demokrasi
8 kalinya untuk forum internasional, **17** kali untuk forum di Indonesia

TESTIMONI



Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif WALHI, Ketua Pengurus INFID)

INFID harus dan akan berkomunikasi lebih kuat kepada publik. Memperkuat kehadiran kembali INFID di ruang publik yang lebih luas. INFID juga akan mengangkat suara dan aspirasi daerah ke alam pertarungan kebijakan di nasional dan internasional untuk pemecahan problem struktural di Indonesia.



Zumrotin (Pendiri INFID)

Bangkitnya INFID kembali (telah) memperkuat jaringan pergerakan LSM di Indonesia.



Bagus takwin (Dosen UI)

Upaya INFID untuk memperjuangkan kualitas masyarakat yang baik sangat diperlukan oleh Indonesia. Semoga itu berlanjut terus.



Nindi Sitepu, CISDI, Pencerah Nusantara

INFID selama ini membantu menyuarakan perspektif masyarakat sipil dan berkoordinasi untuk memastikan terbukanya ruang partisipasi seluruh pihak. Merupakan sebuah kebanggaan bekerja sama dengan INFID dan menjadi bagian dari kerja bersama besar untuk mengarusutamakan Millennium Development Goals (MDGs) dan Pasca-2015 Development Agenda kepada kebijakan pembangunan nasional. Semoga kerja sama INFID dan CISDI akan semakin erat bertahun tahun ke depan.



Angga Dwi Martha, Youth, UNFPA

Sebagai salah satu dari 65 juta generasi muda Indonesia dan kelompok pemuda yang aktif dalam diskusi Pasca-2015, peranan INFID telah membantu saya dan teman-teman lainnya dengan menjadi jembatan dalam menyediakan kesempatan berdiskusi dengan kelompok masyarakat sipil dan pemerintah. Semoga program yang serupa dan lebih kuat dapat diimplementasikan oleh INFID di masa depan.



Yanuar Nugroho, PhD. Peneliti di Universitas Manchester, Inggris

INFID adalah contoh learning organisation masyarakat sipil yang adaptif dengan perkembangan dan dinamika sosial-politik di Indonesia. INFID dikenal sebagai watchdog yang amat kritis terhadap pemerintah sejak jaman Orde Baru hingga pasca reformasi. Dalam tiga tahun terakhir ini, INFID adalah salah satu pemain kunci yang memfasilitasi keterlibatan organisasi masyarakat sipil Indonesia bersama dengan pemerintah dalam penyusunan agenda pembangunan global Pasca MDGs/ Pasca-2015 Development Agenda.

INFID juga mendorong proses keterbukaan pemerintah dan reformasi birokrasi melalui Open Government Partnership, baik dalam realisasi komitmen nasional maupun keterlibatan internasional. Bekerjasama dengan INFID adalah pengalaman berinteraksi dengan organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah namun amat konstruktif dalam mencari terobosan-terobosan guna memastikan partisipasi publik dalam pembangunan.



Diah Saminarsih, Staf Khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Mengalami bekerja bersama INFID sejak 2013, dalam proses perundingan *High Level Panel of Eminent Persons for Post-2015 Development Agenda* hingga pada rangkaian negosiasi *Open Working Group on Sustainable Development Goals*; jelas terbukti INFID memang kaya – kaya semangat dan kaya akan data serta kajian. Selamat meneruskan perjuangan!



Kholiq Arief, Bupati Wonosobo

INFID, lembaga yang mampu merespon gejala perubahan masyarakat. Menarik. Tidak ada guru tidak ada murid yang ada hanya pola dan proses berinteraksi dan saling konsultasi yang dibangun dari banyak arah untuk satu tujuan perubahan. Kondisi itu bisa dilihat dari cara INFID mengambil kesimpulan dan tema pilihan yang pas dengan keadaan dan harapan. Misalnya Kabupaten Wonosobo yang harus digerakkan untuk lebih memaknai perubahan melalui isu human rights cities dan akhirnya harus menjadi kebijakan publik. Sekali lagi, bisnis proses yang sangat menarik untuk diikuti.



Makmur Keliat PhD, Dosen HI Universitas Indonesia

INFID bagi saya lebih daripada sekadar LSM. INFID tidak hanya menekankan pentingnya membangun jejaring dengan LSM yang bergerak di tingkat komunitas lokal, nasional dan internasional. INFID juga memiliki komitmen kuat untuk membangun hubungan dengan komunitas akademik dan juga pembuat kebijakan. Melalui interaksi berjenjang dan meluas seperti ini, INFID tidak hanya suatu ekspresi dari kerja komunitas lintas nasional dan sektoral, tetapi juga ungkapan kerja politik dan akademik untuk membuat hari-hari depan Indonesia menjadi lebih baik.



Iwan Nurdin, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)

INFID telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat sipil di Indonesia tentang pembangunan nasional yang seharusnya mengurangi ketimpangan dalam aspek yang lebih luas seperti asset, pendapatan masyarakat, dan penggunaan APBN. INFID juga telah memberikan kontribusi dalam mengangkat pengalaman nasional masyarakat sipil Indonesia dalam forum Internasional. Bukan itu saja, pengalaman masyarakat Internasional yang sukses maupun gagal juga banyak dibawa pulang oleh INFID untuk dijadikan cermin. Tapi kesuksesan terbesar lembaga ini adalah menjadi rumah bersama masyarakat sipil Indonesia dalam advokasi pembangunan di nasional dan Internasional.



Mickael Bobby Hoelman, Pengamat Kebijakan Sosial

INFID telah berhasil melakukan transformasi tidak hanya sebagai Internasional forum tetapi turut menjadi wadah Indonesia forum yang menaruh banyak perhatian terhadap isu pembangunan dan partisipasi publik.

DEWAN PENGAWAS



Teddy Alfonso - SCEDEI



Dwi Rubiyanti Kholifah - AMAN Indonesia



Budi Wahyuni - Individu

DEWAN PENGURUS



Abetnego Tarigan - WALHI
Ketua



Haris Azhar - KontraS
Wakil Ketua



Dian Kartikasari - Koalisi Perempuan Indonesia
Bendahara



Khairani Arifin - Yayasan Sahara
Anggota



Lien Maloali - Foker LSM Papua
Anggota



Alvon Kurnia Palma - YLBHI
Anggota



Yusnono - Institute Dayakology
Anggota

STAFF INFID



Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif



Beka Ulung Hapsara
Manajer Program



Siti Khoirun Ni'mah
Program Officer Kemiskinan dan Ketimpangan



Hamong Santono
Program Officer MDGs & Pasca-2015



Hilman Handoni
Program Officer HAM dan Demokrasi



Jeckson Robinson
Asisten Program



Misnawati
Manajer Keuangan



Ima Desiyanthi
Akunting



Nidia Viska
Keuangan



Florence
Manajer Kantor dan Sumber Daya Manusia



Suwarno Joyomenggolo
Teknologi Informasi



Sabarno
Staff Operasional



Wasiton
Asisten Staff Operasional

BAB 1 | PROFIL





A. Sejarah INFID

Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional (IMF), United Nation Development Program (UNDP), dan sebelas negara maju berkumpul di Amsterdam pada 1967. Di antara mereka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX duduk mewakili Indonesia. Pertemuan yang digagas Amerika Serikat itu membahas pengadaan utang baru bagi pembangunan di Indonesia. Pertemuan itu membentuk konsorsium baru bernama Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI).

Pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan setelah itu. Namun pemerintah makin lama makin korup dan tidak terkendali. Pembangunan tidak menyertakan partisipasi masyarakat sipil. Kritik dihadapi dengan kekerasan aparat. Para aktivis tak tinggal diam. Mereka bergerak dalam platform Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga menggalang dukungan internasional. Pemerintah lebih mendengarkan suara negara-negara pemberi utang dari pada rakyatnya sendiri.

Juni 1985, perwakilan sejumlah LSM di Indonesia berkumpul dalam sebuah forum masyarakat sipil internasional di Belanda. Pertemuan itu menghasilkan wadah baru bernama Inter-NGO Conference on IGGI Matters (INGI). Beberapa tokoh seperti Abdurrahman Wahid, Adi Sasono, Adnan Buyung Nasution, Dawam Rahardjo, Todung Mulya Lubis ikut berkecimpung di dalamnya. Mereka memandang

pembangunan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kelompok masyarakat sipil di negara-negara anggota IGGI perlu dilibatkan.

Pada perkembangannya, forum ini memberi banyak rekomendasi kritis terhadap proses pembangunan di Indonesia. Bahkan kampanye INGI kerap membuat pemerintah berang karena menyoroti pelanggaran Hak Asasi Manusia. Misalnya, kasus Kedung Ombo, Jawa Tengah, dan pembantaian di Santa Cruz, Dili. Indonesia dikecam dunia internasional, termasuk dari negara-negara donor. IGGI kemudian dibubarkan pada 1992 dan diganti dengan Consultative Group on Indonesia (CGI).

Setahun kemudian INGI bertransformasi menjadi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Meski telah berganti nama, INFID tidak jauh berbeda dengan INGI. Mereka tetap bekerja untuk isu pembangunan di Indonesia. Sembilan tahun pasca reformasi, CGI dibubarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. INFID tetap berdiri dan menjadi organisasi berbentuk perkumpulan.

Anggota INFID kini berjumlah 70 organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Beragam kegiatan berupa penelitian, publikasi, dialog kebijakan, kampanye, dan penguatan jaringan tetap dilakukan untuk mengawal agenda pembangunan. Jumlah publikasi yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal sebanyak 27 buah. INFID juga memiliki jaringan kerja dengan lima lembaga donor dan enam lembaga advokasi.

Sementara anggota dari luar negeri tetap menjadi jaringan INFID dan dewan penasihat. Dalam memperluas jaringan kerja internasional, INFID terlibat dalam jaringan forum NGO Internasional (IFP), *Beyond2015*, *Asian Development Alliance (ADA)*, *Asia Democracy Network (ADN)*. Sejak 2004, INFID memiliki status lembaga yang diakui dan diakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai UN Special Consultation Status with the Economic and Social Council.

Sesuai dengan visinya, INFID berusaha mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mengemban empat misi, yaitu: Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan

sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik; Melakukan penelitian dan kajian kebijakan; Melakukan dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marjinal berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian; Bekerja sama dan melakukan jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional.

Beberapa tahun terakhir, INFID terlibat aktif dalam sejumlah tema advokasi yang sedang mendunia, seperti advokasi anti ketimpangan, penyusunan agenda Pasca-2015, serta advokasi hak asasi manusia dan demokrasi.

B. Analisa Konteks Program

Pasca-2015. Berbeda dengan perundingan MDGs 15 tahun yang lalu, proses pembentukan agenda Pembangunan Global Pasca-2015 berlangsung lebih partisipatif. PBB membuka pintu-pintu partisipasi, mulai dengan pembentukan *High Level Panel on Post 2015, Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG-SDGs)*, dan survey *MyWorld* untuk mendengar suara warga mengenai pembangunan dan masa depan yang lebih baik. Indonesia menjadi salah satu negara penting dalam perundingan dan kesepakatan agenda pembangunan Pasca-2015.

Pada sisi lainnya, perbedaan masalah dan kendala pembangunan antara berbagai negara telah melahirkan berbagai perdebatan tentang prioritas dan pendekatan pembangunan, antara lain, sejauh mana (i) penurunan Ketimpangan dan kemiskinan menjadi prioritas (*inequality atau extreme poverty*); (ii) pembagian tugas dan beban antara negara maju dan negara miskin dan berkembang (*common but different responsibility*) terutama pada tanggungjawab pendanaan dan keuangan, kebijakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan (iii) sejauh mana peran institusi publik dapat mencegah/menurunkan kekerasan serta konflik, melindungi martabat semua warga, tanpa diskriminasi. Termasuk di dalamnya bagaimana Hak Asasi Manusia dan pemerintahan terbuka dipandang penting atau tidak (*stand alone goal versus enabling environment*)

Ketimpangan. Sepanjang 10-15 tahun terakhir, Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam hal pertumbuhan ekonomi. Indonesia kini juga tidak tergantung lagi kepada bantuan dan pinjaman luar negeri (*foreign aid/assistance*) seperti masa 15 tahun lalu. Sebagian besar dana pembangunan kini diandalkan pada pajak dan pendapatan non pajak.

Indonesia bahkan naik kelas menjadi anggota G20, kumpulan negara-negara dengan produksi ekonomi terbesar di dunia. Meski demikian diantara negara-negara G20, Indonesia merupakan (a) negara dengan belanja sosial (*social spending*) terkecil; (b) negara dengan perolehan pajak terkecil (12% PDB), sangat jauh dari profil dan postur ekonominya sebagai negara kelas menengah.

Pada saat bersamaan, ternyata angka Ketimpangan justru meningkat menjadi 0.41 (2012). Ini memberi pelajaran kepada pemerintah baru agar aspek pemerataan juga menjadi perhatian dan prioritas utama. Pemerintah baru Jokowi - Jusuf Kalla memiliki peluang untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Tantangannya untuk pemerataan pembangunan di Indonesia antara lain adalah bagaimana memastikan (i) penurunan Ketimpangan, bukan hanya penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, menjadi indikator pembangunan setiap tahun dan 5 tahun. (ii) bagaimana membuat sistem Pajak dan Belanja sosial Indonesia (*tax and transfer*), dapat efektif menurunkan Ketimpangan; (iii) mendesaknya program-program pemerintah yang memperluas kesempatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, termasuk pemerataan di wilayah-wilayah Indonesia Timur serta penghapusan berbagai praktik diskriminasi (kelompok difabel, perempuan, masyarakat adat, Lansia).

HAM dan Demokrasi. 15 tahun sesudah masa reformasi 1998, Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia dan Asia Tenggara. Empat kali Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan damai dan bebas. Kebebasan pers menjadi mahkota dan kebebasan berserikat dan berpendapat dijamin dan dilindungi. Sementara negara-negara tetangga mengalami pasang surut demokrasi (kudeta di Thailand), Indonesia terus berkembang dan semakin memperkuat demokrasinya.

Namun demikian, demokrasi ternyata melahirkan “Achilles Heel” yaitu tumbuh suburnya kelompok-kelompok fundamentalis yang tidak toleran kepada perbedaan. Tindak intoleransi dan kekerasan kepada minoritas semakin hari semakin kuat. Termasuk berbagai kasus kekerasan kepada Ahmadiyah. Trend lainnya adalah berbagai konflik lahan atau konflik tanah yang meluas seiring ekspansi investasi perkebunan-perkebunan besar tetapi belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Konflik tersebut memperhadapkan warga dengan perusahaan maupun warga dengan pemerintah. Pemerintah SBY sudah membentuk tim penyelidikan namun hingga berakhirnya pemerintahan, belum ada titik terang penyelesaian.

Indonesia juga masih disandera oleh masa lalunya, yaitu belum adanya rekonsiliasi dan akuntabilitas dengan pelanggaran HAM masa lalu. Mulai kasus Munir, kasus Trisakti, Orang Hilang hingga berbagai kasus pelanggaran berat tahun 1965. Disisi lain, berbagai inisiatif dan prakarsa oleh masyarakat dan para pemimpin daerah juga terus berjalan, antara lain (a) rekonsiliasi antar keluarga korban 1965; (b) upaya-upaya untuk mengembangkan HAM di berbagai kota di Indonesia dengan Human Rights Cities.

Partisipasi Indonesia dalam *Open Government Partnership* (OGP) dan Rencana Aksi Open Government Indonesia di dalam negeri sejak tahun 2011, menjadi peluang untuk memperkuat arus reformasi kelembagaan pemerintah. Lahirnya LAPOR sebagai pintu bagi pengaduan dan perbaikan pelayanan publik merupakan kemajuan yang harus diperkuat dan diperluas hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

BAB 2 | PROGRAM INFID 2014





A. MDGs dan Post 2015 Development Agenda

1. Sejarah MDGs dan Pencapaian Indonesia

Waktu yang tersisa kurang dari setahun lagi. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dituntut untuk segera memenuhi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Program ini adalah hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB di New York pada September 2000. Pertemuan yang dihadiri 189 negara, termasuk Indonesia, ini menyepakati Deklarasi Milenium dan mengadopsi MDGs di negara masing-masing.

MDGs menetapkan delapan tujuan pembangunan dengan delapan belas targetnya. Delapan tujuan yang dimaksud diantaranya; menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian balita; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Delapan capaian itu sebelumnya telah disusun oleh para ahli dari Sekretariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD). Awalnya, MDGs merupakan

sebuah laporan kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh OECD pada 1990. Laporan tersebut kemudian disarikan menjadi Tujuan Pembangunan Internasional dan direvisi menjadi MDGs pada KTT Milenium. PBB kemudian menetapkan komitmen pembangunan global dicapai hingga 2015.

Empat belas tahun berlalu sejak MDGs disepakati, pemerintah Indonesia masih kesulitan mencapai tiga tujuan MDGs. Pertama, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Dalam setahun, 25.000 hingga 34.560 ibu meninggal karena melahirkan. Program jaminan persalinan (Jampersal) yang diterapkan pemerintah untuk mempercepat pencapaian MDGs, ternyata tidak mengenai sasaran. Mayoritas warga tidak mengetahui program Jampersal dan sebagian lagi menganggap prosedurnya rumit.

Tujuan lainnya yang tidak tercapai adalah upaya memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya. Tren HIV/AIDS tidak menunjukkan angka penurunan, bahkan Indonesia masuk dalam sepuluh besar negara dengan pengidap terbanyak. Yang terakhir yaitu tujuan menjamin kelestarian lingkungan hidup. Indonesia belum bisa menurunkan laju penggundulan hutan serta menyediakan sanitasi yang layak.

INFID menilai salah satu kegagalan tersebut karena Indonesia mengalami keterlambatan dalam mengadopsi MDGs. Negara ini mulai fokus menjalani program MDGs pada 2004, padahal penandatanganannya sudah dilakukan empat tahun sebelumnya. Proses penyusunan MDGs yang tidak partisipatif menjadi penyebab lain kegagalan pencapaian MDGs. Selain itu, rendahnya mekanisme akuntabilitas negara adalah sebab lain. "Ketika semua sudah berbicara agenda pembangunan Pasca-2015, MDGs itu gagal," tegas Hamong Santono, Program Officer MDGs & Pasca-2015 INFID. Karena itu, advokasi INFID difokuskan pada agenda pembangunan Pasca-2015.

2. Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan Proses Negosiasi Global

Menjelang berakhirnya program MDGs, agenda pembangunan global Pasca-2015 disusun dengan melibatkan banyak pihak sejak 2010. Masyarakat global dan para pemangku kepentingan menegosiasikan sebuah kerangka kerja baru pengganti MDGs. Sejauh ini nama penggantinya belum ditentukan. Sebagian besar menyebutnya pembangunan Pasca-2015 atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pengganti MDGs itu bakal disepakati pada bulan September 2015 dan akan berlaku mulai Januari 2016.

Penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, *Post-2015* yang merupakan proses antar negara untuk membangun dan mengembangkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Proses ini sering disebut SDGs. Jalur kedua, *United Nations (UN) Secretary General-Led* yaitu proses yang dipimpin oleh Sekjen PBB melalui serangkaian diskusi dan didukung melalui berbagai konsultasi baik di tingkat nasional, regional, dan global. Jalur ini sering disebut *Post-2015*. Kedua jalur tersebut telah berlangsung dan digabung pada September 2014 menuju proses intergovernmental yang perundingannya berjalan pada Januari 2015.

Jalur *Member State-Led* bermula dari *United Nations Conference on Sustainable Development* pada Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brazil (Rio+20 atau *Earth Summit 2012*). Pertemuan itu menyepakati pembentukan *Open Working Group on Sustainable Development Goals* (OWG on SDGs), untuk merumuskan satu set tujuan pembangunan global sebagai pertimbangan Sidang Umum PBB, September 2014.

Rio+20 juga menyepakati dibentuknya *Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing* (ICESDF) dan *High Level Political Forum* (HLPF). ICESDF dibentuk untuk mengevaluasi dan mengusulkan pilihan pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang efektif. Sementara HLPF merupakan institusi pengganti *Commission on Sustainable Development* (CSD) dan menjadi badan tertinggi untuk pembangunan berkelanjutan di bawah sistem PBB.

Jalur kedua, *United Nations (UN) Secretary General-Led* merupakan mandat dari pertemuan "*The 2010 High Level Plenary Meeting of the General Assembly on The*

MDGs". Pertemuan tersebut meminta Sekjen PBB untuk memberikan laporan tahunan dari kemajuan pelaksanaan MDGs dan membuat rekomendasi untuk kemajuan agenda pembangunan Pasca-2015. Beberapa proses yang berlangsung dalam jalur ini antara lain: UN System Task Team (UNTT), Konsultasi tematik nasional dan global, High Level Panel of Eminent Person (HLPEP), Laporan Sekjen PBB, UN Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN), UN Global Compact (UNGC), UN Non Governmental Liaison Service (UN-NGLS), dan President The General Assembly (PGA) Events on The Post-2015 Development Agenda.

Setelah kedua jalur itu berlangsung, tahap berikutnya adalah proses intergovernmental. Dua dokumen utama yang menjadi acuan proses ini adalah "Outcome Document" dari OWG on SDGs dan Laporan Sintesa Sekjen PBB. Proses intergovernmental ini dipastikan akan tetap terbuka, transparan dan inklusif, sehingga ada jaminan keterlibatan kelompok masyarakat sipil dan aktor pembangunan lainnya.

Sejak 2012, ada beberapa dokumen kunci yang telah dihasilkan oleh PBB, di antaranya Laporan HLPEP (mengusulkan 12 tujuan pembangunan), Laporan Sekjen PBB "A Life of Dignity for All" (mengusulkan 15 agenda pembangunan), Outcome Document OWG on SDGs (mengusulkan 17 tujuan pembangunan), Laporan Sintesa Sekjen PBB "The Road to Dignity by 2030" (mengusulkan 6 elemen pembangunan).

Selain itu, kelompok masyarakat sipil atau Civil Society Organizations (CSO) Indonesia juga terlibat dalam penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015. Beberapa dokumen yang dihasilkan di antaranya Deklarasi CSO Indonesia untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015; Penyusunan Buku *Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015*; Komunike Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015, Respons CSO Indonesia terkait Laporan HLPEP; Surat Terbuka CSO Indonesia untuk OWG on SDGs; Rekomendasi CSO Indonesia untuk OWG on SDGs; Usulan CSO Indonesia untuk OWG on SDGs; Respons CSO Indonesia terkait Laporan Sintesa Sekjen PBB; Respons terhadap Outcome Document OWG on SDGs; Penyusunan "Outcome Document" Beyond 2015.

3. Posisi dan Peran INFID

Advokasi INFID terkait dengan program MDGs dan agenda pembangunan Pasca-2015 memiliki dua tujuan. Pertama, mendorong komitmen global dan pemerintah nasional untuk mencapai tujuan MDGs. Komitmen global yang dimaksud terkait dengan bantuan dari negara-negara maju ke negara-negara miskin dan berkembang sebesar 0,7 persen dari total GDP. INFID juga mendorong pemerintah nasional untuk menurunkan angka kematian ibu dan menjamin kelestarian lingkungan. Tujuan kedua, memastikan agenda pembangunan Pasca-2015 bisa lebih baik dalam menjawab masalah pembangunan serta memastikan usulan masyarakat sipil diadopsi di dalam agenda tersebut.

Sejak Januari 2014, INFID intens melakukan dialog kebijakan agenda pembangunan Pasca-2015 dengan Kementerian Luar Negeri dan Bappenas. INFID memberi masukan kepada pemerintah terkait negosiasi di OWG on SDGs. Tiga dokumen telah disampaikan kepada pemerintah, antara lain "Rekomendasi CSO Indonesia untuk OWG on SDGs" (disampaikan pada 27 Februari 2014), "Usulan CSO Indonesia untuk pertemuan OWG on SDGs 11" (disampaikan pada 29 April 2014), dan dokumen usulan dari Beyond2015 terkait dengan "zero draft" OWG on SDGs (disampaikan pada 11 Juli 2014).

Saat pertemuan OWG on SDGs kedelapan di New York, 1-7 Februari 2014, INFID hadir di dalamnya. Di sana, INFID ikut menghadiri *side event* Kantor Utusan Khusus Presiden RI (KUKPRI) untuk MDGs "A Framework for Improving the Health of Adolescent Girls" dan *side event* "Promoting Transparent, Public Participation and Accountability in the Sustainable Development Goals" yang diselenggarakan UKP4. Pertemuan informal juga diadakan bersama *Human Right Watch* dan Duta Besar Indonesia untuk PBB, Desra Percaya, untuk membahas pembangunan Pasca-2015.

Bappenas juga melibatkan INFID dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah 2015. Bersama Kemitraan dan Perkumpulan Prakarsa, INFID memfasilitasi Forum Konsultasi Publik (FKP) di Makassar, Medan dan Jakarta selama Maret hingga April 2014. Forum

ini diadakan untuk meminta masukan dari CSO terkait penyusunan RPJMN dan RPK.

INFID mengadakan Konsultasi Nasional "*Partnerships with Civil Society and Other Actors*" pada 18-19 Juni 2014. Konsultasi ini merumuskan usulan untuk PBB terkait kemitraan antara pemerintah dan CSO dalam pelaksanaan pembangunan pasca-2015. Sebagai kelanjutan dari kegiatan itu, INFID menghadiri pertemuan global "*Partnership with Civil Society*" di Siem Reap, Kamboja pada 20-21 Oktober 2014. Pada kesempatan itu, INFID menyampaikan hasil Konsultasi Nasional dan pentingnya mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan pasca-2015.

Pertemuan para ahli atau *expert meeting* juga diadakan untuk mempersiapkan penyelenggaraan *side event Justice and Governance* di New York. Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Kemenlu, Bappenas, UKP4, KUKPRI MDGs, UNDP dan perwakilan CSO. Pada bulan yang sama, INFID menghadiri Sidang Umum PBB ke-69 di New York pada 19-28 September 2014. Di sana, INFID bekerjasama dengan Beyond2015, ADA, KUKPRI MDGs, Yayasan TIFA dan *Open Society Foundation (OSF)* menggelar *side event "Ensuring Justice and Governance in Post-2015 Development Goals"* di kantor OSF. Kegiatan ini untuk mendukung/memperkuat masuknya akses keadilan dan tata kelola ke dalam agenda pembangunan pasca2015, serta membangun kemitraan yang strategis.

INFID juga menghadiri beberapa pertemuan lain seperti *Executive Committee Beyond2015* dan *Steering Committee Open Government Partnerships* yang membahas tiga agenda diantaranya: Rencana kerja Pemerintah Meksiko sebagai ketua menggantikan Indonesia; Rencana kerja 3 tahun Support Unit; Laporan hasil penelitian IRM mengenai pelaksanaan dan reaksi berbagai negara rencana; Rencana OGP membentuk Duta Besar OGP.

Pada Konferensi Beyond2015 di Kopenhagen, Denmark, INFID hadir di antara 170 CSO dari sekitar 46 negara. Konferensi ini menghasilkan dokumen *statement* dari CSO terkait agenda pembangunan pasca-2015 yang menekankan kesetaraan sebagai inti, dan rekomendasi teknisnya. Kedua dokumen itu diharapkan menjadi salah satu dokumen kunci dalam advokasi masyarakat sipil untuk pembangunan pasca-2015.

INFID juga berpartisipasi dalam pertemuan anggota parlemen Asia Pasifik di Surabaya pada 12-13 November 2014. Lebih dari seratus wakil parlemen Asia Pasifik menghadiri acara tersebut. Dalam kesempatan itu, INFID menjadi narasumber mengenai MDGs dan Post 2015. Narasumber lainnya yaitu Kepala UNDP Indonesia dan Kepala Kantor ADB di Jakarta.

November 2014, INFID terlibat aktif dalam Kelompok Kerja Tata Kelola dan Akses terhadap Keadilan bersama Bappenas dan UNDP. Kelompok kerja ini bertujuan untuk menyusun target dan indikator tujuan tata kelola dan akses terhadap keadilan yang akan diusulkan Indonesia dalam pembangunan Pasca-2015 dan juga dalam RPJMN 2015-2019. Kelompok Kerja ini akan bekerja hingga September 2015.

INFID berpartisipasi dalam pertemuan ADA di Bangkok, jaringan kerja level Asia bersama Vani (India), CCC (Kamboja), Social Watch (Filipina), pada Februari 2014. Bersama enam perwakilan CSO Asia Tenggara, INFID menghadiri pertemuan ADA di Seoul, 5-6 Desember 2014. Ada dua agenda utama yang dibahas. Pertama, penyampaian penilaian dan catatan tentang dokumen *outcome* OWG. Kedua, membuat tinjauan dan penilaian atas laporan Sekjen PBB yang keluar pada 4 Desember 2014.

Sejumlah riset dan kajian juga dilakukan INFID. Beberapa di antaranya Laporan Indeks Barometer Sosial; Riset Praktek Diskriminasi dan Suara Kelompok Rentan dalam Pembangunan; Penyusunan analisa INFID tentang Ketimpangan, Pajak dan Hak Asasi Manusia; Penyusunan RPJMN versi CSO; Penyusunan Kertas Kerja *Governance*, Difabel, Akses terhadap Keadilan, Politik Toleransi; Penyusunan Rekomendasi CSO Indonesia untuk OWG on SDGs.

Semua kerja advokasi tersebut pada intinya untuk menyeimbangkan antara advokasi di level internasional dengan nasional. Selain memberi masukan kepada pemerintah Indonesia terkait negosiasi global, INFID juga memastikan agar agenda pembangunan pasca 2015 bisa cepat diadopsi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Highlight Program MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-2015

Pertemuan Sidang Umum PBB di New York

Selain menghadiri Sidang Umum PBB ke 69, INFID juga mengadakan *side event* “Ensuring Justice and Governance in Post-2015 Development Goals” bersama jaringan kerja. *Side event* ini bertujuan memperkuat/mendukung masuknya akses terhadap keadilan dan tata kelola dalam agenda pembangunan Pasca-2015 dan membangun kemitraan yang strategis. Di sana, INFID juga menghadiri pertemuan Executive Committee Beyond 2015, Steering Committee Open Government Partnerships, dan lainnya.

B. Kemiskinan & Ketimpangan

1. Ketimpangan Global

“Setiap negara yang saya kunjungi mencemaskan tentang ketimpangan,” kata Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia. Dalam laporannya, Bank Dunia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia, khususnya Asia Timur dan Pasifik, mengalami ketimpangan terparah sejak Perang Dunia II. Salah satu penyebabnya, ekonomi China mengalami laju pertumbuhan sebesar 8,7 persen pada 2009. Sementara negara-negara sekitarnya tumbuh sekitar satu persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi negara di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia mengalami penurunan selama tiga kuartal.

Para peneliti dari Organisasi Untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) melaporkan perkembangan kesejahteraan global dewasa ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Selama 200 tahun terakhir, ketimpangan justru mengalami lonjakan drastis beberapa tahun ini. Di antara 34 negara yang tergabung dalam OECD, sebanyak sepuluh persen orang-orang terkaya di sejumlah negara tersebut berpenghasilan rata-rata 9,5 kali dari yang termiskin. Upaya mengatasi ketimpangan yang semakin tinggi menjadi sangat penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Krisis besar yang melanda Amerika Serikat pada 2008 ikut merambat ke negara-negara Uni Eropa. Kondisi ini telah mengubah tatanan ekonomi dan politik global. Tren pembiayaan pembangunan pun berubah. Negara-negara maju tidak lagi memenuhi komitmennya sesuai Konsensus Monterrey yaitu 0,7 persen dari total GDP. Mereka mendorong pendanaan yang berasal dari sektor swasta. Pada 2012 hanya ada lima negara yang menjalankan komitmennya, yaitu Swedia, Norwegia, Luxemburg, Denmark, dan Belanda. Kondisi ini mendorong pembiayaan pembangunan bersumber dari pajak.

Koalisi negara maju di dunia atau G8 tidak mampu mengatasi krisis. AS kemudian mengundang dua puluh kepala negara agar bisa mengatasi krisis. G8 beralih menjadi G20. Forum ini mulanya banyak dikritik organisasi masyarakat sipil, karena menutup diri kepada mereka. G20 juga dinilai tidak memecahkan masalah. Dua tahun kemudian, pertemuan di Korea Selatan membahas agenda pembangunan dan melibatkan kelompok masyarakat sipil. Civil 20 pun dibentuk untuk mewadahi CSO dari negara-negara anggota G20. Sejak itu, INFID mulai ikut serta dan membuka dialog dengan pemerintah Indonesia yang menjadi anggota dari G20.

2. Ketimpangan Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang berhasil dihimpun menunjukkan kemiskinan cenderung menurun tiap tahun, namun pada waktu yang sama ketimpangan semakin meningkat. Angka kemiskinan menurun dari 16,66 persen pada 2004 menjadi 11,47 persen pada 2014. Pada dekade yang sama ketimpangan melonjak drastis. Indeks rasio gini, sebagai salah satu indikator pengukur ketimpangan, meningkat dari angka 0,36 persen pada 2003 menjadi 0,42 persen pada 2013.

Meningkatnya angka ketimpangan tentu mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang kian tinggi juga mengakibatkan sekitar 68 juta penduduk miskin di Indonesia tetap berada pada kondisinya, secara tak langsung membuat warga miskin lebih sulit lagi keluar dari kemiskinannya. Pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pasar bebas di Indonesia selama sepuluh tahun belakangan terbukti

tidak menurunkan ketimpangan. Kondisi sebaliknya, ketimpangan justru kian melebar.

Pada kenyataannya ketimpangan terjadi di berbagai sektor. Ada ketimpangan pendapatan, kesehatan, perumahan, aset, bahkan ketimpangan kesempatan. Pada satu kasus, orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak maka sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dampaknya dia juga akan kesulitan memperoleh kehidupan yang layak, seperti akses terhadap kesehatan maupun tempat tinggal.

Keragaman ketimpangan mendorong INFID untuk memilih fokus dalam melakukan advokasi. Secara bertahap, INFID fokus pada ketimpangan kesempatan dan ekonomi. Program ini mulai berjalan efektif sejak 2012. Mulanya INFID lebih banyak kampanye untuk menggugah kesadaran publik untuk mengurangi ketimpangan, terutama di bidang ekonomi. Di luar itu, advokasi mulai mengarah pada studi mendalam terkait ketimpangan, baik dalam sistem perpajakan, perbankan, kesehatan, pendidikan.

Laporan hasil studi itu dipublikasi pada 15 November 2014 berupa buku berjudul "Ketimpangan Pembangunan Indonesia Dari Berbagai Aspek". Publikasi dibuat untuk memperkuat argumentasi bahwa Indonesia sedang menghadapi kondisi di mana tren ketimpangan makin meningkat. Hasil studi tersebut juga dipakai sebagai bahan dialog dengan pengambil kebijakan maupun pemerintah, termasuk saat debat capres 2014.

3. Posisi dan Peran INFID

Sejak awal INFID memiliki mandat memastikan adanya kebijakan yang memiliki perhatian terhadap penurunan kemiskinan. Namun fokus kemiskinan dalam dua tahun terakhir beralih kepada isu ketimpangan. Masalah yang dihadapi Indonesia bukan hanya kemiskinan, tapi juga problem percepatan ketimpangan. Dari kondisi ini, INFID tidak hanya melakukan advokasi untuk mengurangi kemiskinan absolut, tapi juga memastikan agar kebijakan itu tidak hanya memberikan manfaat bagi segelintir orang.

Advokasi ketimpangan mulai dikerjakan pada 2013. Tujuannya mendorong adanya kebijakan di tingkat nasional maupun internasional yang sanggup menurunkan

ketimpangan. Di tingkat nasional, advokasi dilakukan dengan mengadakan rangkaian dialog antara anggota dan jaringan INFID, akademisi, pemerintah, maupun anggota legislatif. INFID juga menjadi bagian dalam proses penyusunan RPJMN 2015-2019. Dengan posisi tersebut, INFID berupaya memasukkan usulan kebijakan terkait dengan penurunan ketimpangan.

Salah satu indikator dari keberhasilan advokasi adalah perubahan kebijakan. Untuk mencapai itu, banyak hal yang dilakukan INFID. Di antaranya, melakukan studi kebijakan atau kajian data hasil temuan di lapangan untuk memperkuat argumentasi; Melakukan publikasi dalam bentuk penerbitan buku ataupun seminar; Dialog kebijakan dengan pemerintah atau instansi terkait; Memperluas jaringan, bertemu dengan berbagai macam kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat posisi INFID; Penguatan kapasitas. Hal ini melihat kebutuhan masyarakat sipil untuk melakukan advokasi. Semua langkah itu menjadi prasyarat untuk melakukan advokasi.

Di sisi lain, advokasi masyarakat sipil juga dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menurunkan ketimpangan. Proses perubahan kebijakan dapat diwujudkan dengan adanya keterlibatan kelompok masyarakat sipil. Penguatan masyarakat sipil di dunia yang makin timpang adalah tema yang diusung INFID dalam menjalankan advokasi kebijakan terkait isu ketimpangan. Pada 10-14 Februari 2014, INFID mengadakan dialog kebijakan dan pelatihan advokasi ketimpangan di Yogyakarta. Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas anggota dan jaringan kerja.

INFID juga mengadakan dialog kebijakan dengan pemerintah, meliputi Bappenas, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 Juni 2014. Dalam dialog tersebut, mereka mengulas perkembangan G20 dari perspektif pemerintah dan masyarakat sipil. Pada 20-21 Juni 2014, INFID menghadiri Civil 20 Summit di Melbourne, Australia. Ini merupakan sebuah forum masyarakat sipil yang berasal dari dua puluh negara anggota G20. Kehadiran INFID dalam rangka mempengaruhi Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang diadakan pada November kemudian. Pada kesempatan itu, perwakilan INFID menjadi narasumber dalam menyampaikan presentasi mengenai infrastruktur yang menjadi fokus G20, termasuk isu perpajakan.

Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama Civil 20 yang dikoordinir oleh koalisi masyarakat sipil Australia. Rekomendasi itu untuk disampaikan kepada para pemimpin G20. Isu ketimpangan, khusus di bidang kesehatan, juga menjadi rekomendasi yang diusulkan INFID. Para pemimpin G20 dituntut mencari cara untuk mengurangi ketimpangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari kelompok masyarakat sipil. "Tidak ada gunanya para pemimpin dunia ini bicara pertumbuhan ekonomi kalau hasilnya ekonomi masyarakat semakin timpang," kata Siti Khoirun Nikmah, Program Kemiskinan & Ketimpangan INFID.

Dua bulan sebelum KTT G20 diselenggarakan, INFID mengadakan diskusi dengan tema G20 dan Tantangan Pemerintahan Baru. Dalam diskusi tersebut, INFID mencoba mengidentifikasi agenda luar negeri pemerintahan Jokowi-JK, terutama di Fora G20. Kehadiran Jokowi dalam konferensi tersebut untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai Presiden RI. Di sana, Jokowi menyampaikan reformasi ekonomi dan masalah infrastruktur.

INFID juga sedang melakukan kajian ketimpangan di berbagai tema, seperti ketimpangan dalam hal pangan, perpajakan, perempuan. Paper tersebut juga sebagai masukan di dalam pertemuan internasional lainnya. Pada September 2014, INFID menghadiri Sidang Umum PBB mengenai MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Dalam kesempatan itu, INFID bersama jaringan masyarakat sipil internasional juga mengusung isu ketimpangan di bidang kesehatan. INFID menyuarkan pentingnya peran PBB dan dunia untuk memberikan perhatian terhadap ketimpangan yang semakin meningkat, sehingga ada komitmen bersama dari banyak negara untuk menurunkan ketimpangan.

Program penurunan ketimpangan juga dikerjakan bersama jaringan kerja di tujuh negara bernama BRICSAM (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China, Afrika Selatan, Mexico) dan Oxfam. Bersama jaringan kerja itu, INFID memfasilitasi *Exchange Visit* "Ketimpangan" jaringan kerja dari India dan Afrika Selatan, pada Oktober 2014. INFID juga mengadakan studi bersama tentang ketimpangan di bidang kesehatan. Mulai dari layanan dasar hingga hak warga negara berkembang terhadap farmasi. Selain itu, dalam rangka mempelajari kondisi ketimpangan di China dan peran masyarakat

sipil di sana, INFID datang ke negeri Tiongkok untuk mengikuti *Peer to Peer Visit* pada awal November 2014.

Pada Desember 2014, INFID menjadi narasumber dalam pertemuan jaringan kerja Oxfam Internasional di Jakarta. Dalam kesempatan itu, INFID menyampaikan data ketimpangan dan peran yang dilakukan INFID terkait penyampaian data kinerja pajak Indonesia, belanja sosial yang minimal dan juga kesenjangan upah antara level gaji/pendapatan CEO dibandingkan dengan gaji karyawan *entry level* dengan besaran upah minimum.

Penyelenggaraan Pemilu 2014 begitu signifikan bagi kehidupan bernegara selama lima tahun mendatang. INFID memanfaatkan ruang-ruang politik di saat pemilu berlangsung. Hal ini guna melakukan identifikasi sejauh mana partai politik memiliki komitmen terhadap penurunan ketimpangan dan kemiskinan. Pada akhir Maret 2014, INFID mengadakan seminar publik sekaligus peluncuran buku berjudul “Partai Politik, Pemilihan Umum, dan ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia”. Buku ini merupakan hasil penelitian bersama LIPI mengenai Parpol dan ketimpangan di Indonesia.

INFID juga membuat kertas posisi atau analisa untuk diberikan kepada calon presiden, termasuk Joko Widodo. Dengan rekomendasi itu, isu ketimpangan menjadi pembahasan yang penting dalam debat politik calon presiden. Capres dan Caleg peserta Pemilu 2014 didesak untuk bersikap dan memiliki rencana yang konkret untuk mengatasi ketimpangan. Selama Pemilu 2004 dan 2009, tema ketimpangan belum pernah menjadi pembahasan dan diperdebatkan. Padahal dampak yang diakibatkan pada persoalan ini nyata, konkret dan dialami oleh banyak warga negara.

INFID mengajukan tiga skenario yang bisa dilaksanakan pemerintah secara sekaligus. Pertama, perubahan kebijakan. Penurunan ketimpangan atau gini rasio menjadi indikator keberhasilan pembangunan dalam RPJMN dan RPJMD 2015-2019. Kedua, mendorong penguatan kelembagaan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memperkuat UKP4, BPN, BPS, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, LIPI, universitas dan lembaga lain agar kendala dan rintangan di lapangan segera dapat dipecahkan.

Ketiga, penataan pendataan atau akuntabilitas. Pengadaan data-data baru seperti penyusunan pelaporan tahunan indeks gini perlu dilakukan.

Highlight Program Ketimpangan

Pertemuan BRICSAM

BRICSAM sebagai kekuatan baru dalam tata ekonomi politik global oleh negara-negara selatan. INFID memfasilitasi jaringan kerja BRICSAM dari India dan Afrika Selatan dalam *Exchange Visit* bersama Oxfam. Pertemuan ini sebagai upaya menurunkan ketimpangan bersama jaringan kerja tersebut, khususnya ketimpangan di bidang kesehatan.

C. HAM dan Demokrasi

1. Situasi Demokrasi dan HAM Regional/Internasional

Sehari setelah Joko Widodo resmi menjabat sebagai Presiden RI, Indonesia terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan HAM PBB merupakan badan antarpemerintah di dalam sistem PBB yang bertugas memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Dewan ini memiliki berbagai mekanisme perlindungan HAM. Salah satunya Tinjauan Periodik Universal atau Universal Periodical Review (UPR). Dalam mekanisme UPR, sekitar 48 negara ditinjau setiap tahun.

Selain mekanisme HAM PBB, negara-negara dunia juga bekerja keras membumikan HAM di dalam kota. Kota Gwangju, Korea Selatan, telah mewujudkan diri sebagai *Human Rights City*. Kota ini telah menyusun falsafah dasar, sepuluh prinsip, lima area kerja, delapan belas tugas dan seratus indikator pemenuhan HAM. Kantor Dinas HAM dan Ombudsman dibangun untuk mengkoordinasi dan memonitor kerja-kerja pemenuhan HAM. Alhasil, kota ini meralisasi hak atas rasa aman, keterbukaan akses

informasi, aksesibilitas bagi difabel, hak atas pendidikan, lingkungan yang bersih dan ketersediaan fasilitas hiburan.

Di tingkat regional, Piagam ASEAN telah mendorong pembentukan Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR), meskipun keberadaan komisi itu belum memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. AICHR tak punya mandat yang cukup untuk membuka mekanisme pengaduan, penyelidikan, dan merespons kasus-kasus pelanggaran HAM, serta dinilai tidak independen dalam bekerja. Di satu sisi, ketiadaan sekretariat komisi dan minimnya dukungan finansial menjadi kendala tersendiri.

Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) yang dikeluarkan pada 2009 merupakan sebuah langkah maju. Secara substansial, deklarasi ini memasukkan hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak pekerja migran, dan hak-hak difabel. Meski demikian, AHRD juga menuai kritik karena jauh di bawah standar internasional. Deklarasi ini bertentangan dengan prinsip universalitas HAM dengan membatasi penerapannya berdasarkan konteks regional dan nasional. Deklarasi ini juga cenderung tertutup, masyarakat sipil tidak bisa memberi masukan dalam proses pembahasannya. Di luar ASEAN, Indonesia menginisiasi lahirnya *Bali Democracy Forum* (BDF), sebuah forum kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia yang diadakan di Bali.

Kualitas pemerintahan yang baik adalah hal mutlak dalam memperkuat demokrasi dan aktualisasi HAM. Demi mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Indonesia bersama tujuh negara lain mendirikan Open Government Partnership (OGP) pada 2011. Inisiatif global ini berupaya mendorong pemerintahan agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel – dengan lembaga negara yang memberdayakan warga, dan responsif terhadap aspirasi mereka.

Lahirnya Piagam ASEAN, Bali Democracy Forum, Open Government Partnership merupakan bukti bahwa Indonesia ikut memotori demokratisasi di tingkat regional maupun global. Dengan demikian, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk terus memajukan HAM di tingkat nasional, serta memberikan sumbangsih pada upaya bersama di tingkat regional dan internasional.

2. Situasi Demokrasi dan HAM di Indonesia

Kasus diskriminasi dan intoleransi di Indonesia masih tinggi. Sepanjang 2013 terdapat 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, berdasarkan laporan Wahid Institute. Sebanyak 106 kasus melibatkan penyelenggara negara, dan 139 kasus dilakukan oleh aktor non negara. Kelompok minoritas menghadapi serangan fisik dari kelompok militan, dengan penanganan yang minimal dari pemerintah. Bahkan di Bogor, Jawa Barat, pemerintah daerah ikut menyegel bangunan gereja Jemaat GKI Yasmin, meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan untuk mendirikan gereja itu.

Lemahnya perlindungan HAM oleh negara membuat tingkat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah menurun. Hal ini mempengaruhi kualitas pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Di samping itu, ruang demokrasi makin dipersempit dengan pemberlakuan UU Ormas, UU ITE, dan dicabutnya UU Pilkada Langsung, serta situasi kekerasan dan ketidakadilan di Papua juga tak kunjung membaik.

Selain itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) selama ini hanya berjalan formalistik, tanpa partisipasi publik secara bermakna. Di Malingping, Banten, misalnya, program jaminan persalinan (Jampersal) kurang dinikmati masyarakat. Sosialisasi minim dan kelompok bidan kurang dilibatkan dalam perencanaan. Pembangunan fasilitas kesehatan juga tidak sesuai aspirasi warga karena lokasinya jauh dari pemukiman. Program Jampersal pun gagal. Akibatnya angka kematian ibu dan gizi buruk masih tinggi.

Di sisi lain, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sudah di depan mata. Sayangnya, inisiatif mengenai bisnis dan HAM belum muncul di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia belum mampu berperan dalam memperkuat mekanisme HAM melalui AICHR. Selama lima tahun berdiri, AICHR belum menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara. Padahal komisi ini diharapkan bisa memberikan perlindungan sekaligus menyelesaikan pelanggaran HAM yang tidak bisa diselesaikan di tingkat nasional.

3. Posisi dan Peran INFID

Advokasi pemenuhan HAM dan demokrasi yang dikerjakan INFID ditujukan untuk mendorong pemenuhan hak sipol dan ekosob negara kepada warganya. Di level lokal, penguatan kapasitas warga perlu dibangun untuk menuntut akuntabilitas maupun transparansi program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Penguatan kapasitas ini dilakukan di empat wilayah dengan fokus permasalahan yang berbeda. Di Lebak dan Jember mengenai Jampersal. Sementara Morowali dan Pangkep tentang gizi buruk.

Upaya penguatan masyarakat sipil perlu dilakukan untuk mendorong negara merealisasi pemenuhan HAM. Dalam konteks ini, INFID mempromosikan akuntabilitas sebagai aktualisasi HAM dalam proses demokrasi. Metode akuntabilitas sosial digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memastikan pemenuhan hak terkait program pembangunan di daerah.

Advokasi ini berlangsung hingga pertengahan 2014 di empat kabupaten, yaitu Jember (Jawa Timur), Morowali (Sulawesi Tengah), Pangkep (Sulawesi Selatan), dan Lebak (Banten). INFID menggandeng sejumlah organisasi masyarakat sipil setempat. Kualitas pemerintahan yang akuntabel dan terbuka melalui upaya akuntabilitas sosial, perlu didorong untuk memperkuat demokrasi dan aktualisasi HAM.

INFID juga mendorong pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam memajukan HAM di tingkat kota/kabupaten. Mekanisme *Human Rights Cities* bisa mendorong para pemimpin lokal mewujudkan kota/kabupaten ramah HAM. Saat ini, beberapa kepala daerah di Indonesia telah menunjukkan inisiatifnya dalam merealisasi pemenuhan HAM. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang melakukan perampingan dan efisiensi birokrasi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah. Sejak awal 2014, INFID melakukan asistensi kepada Pemkab Wonosobo dalam membuat peraturan daerah ramah HAM. Proses advokasi ini menghasilkan *assessment* dan naskah akademik. Kabupaten Wonosobo adalah daerah pertama yang menyandang predikat *Human Rights Cities* di Indonesia.

Kota lain yang dinilai ramah HAM yaitu Palu, di mana walikotanya mengeluarkan peraturan daerah mengenai rehabilitasi hak-hak korban peristiwa 1965. Peraturan ini sebagai jalan rekonsiliasi atau memulihkan hubungan dan menyelesaikan diskriminasi para korban. Selain itu, Bupati Batang menggelar Festival Anggaran yang mewajibkan setiap dinas untuk mempublikasi anggaran dan penyerapannya. Praktik ini sebagai wujud pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sementara Pemprov DKI Jakarta berupaya memenuhi hak kesehatan melalui jaminan Kartu Jakarta Sehat.

Pada 9 Desember 2014, INFID bekerja sama dengan Pemkab Wonosobo, Kedutaan Besar Inggris, Elsam, dan Save The Children, menyelenggarakan Konferensi Nasional Human Rights Cities: Menuju Kota/Kabupaten Ramah HAM. Kegiatan ini untuk menghadirkan pengalaman dan inisiatif pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terkait pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM. Konferensi itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Palu, Walikota Bogor, dan Bupati Bantaeng, Bupati Banyuwangi, Bupati Wonosobo, dan Wakil Walikota Makassar. Pertemuan ini dalam rangka menyusun indikator atau ukuran-ukuran *Human Rights Cities* dalam konteks lokal di Indonesia.

Sebelumnya, Pada Mei 2014, INFID datang ke Gwangju untuk menghadiri pertemuan *World Human Rights Cities Forum*. Sehari sebelum konferensi itu, INFID menjadi narasumber dalam diskusi pertemuan para ahli atau *expert meeting*.

Di level global, INFID ikut berpartisipasi dalam mendorong pemanfaatan mekanisme yang ada di regional maupun internasional untuk memecahkan pelanggaran HAM dan masalah demokrasi di Indonesia. INFID yang memiliki *Special Status on Ecosob* di PBB sejak 2004, menggunakan status itu untuk advokasi langsung dalam mekanisme HAM PBB. INFID hadir pada sesi sidang ke 52 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB di Jenewa, Swiss. Pada kesempatan itu, Dewan HAM meninjau laporan resmi pemerintah Indonesia. Sebagai pembanding, INFID membuat Laporan Bayangan Masyarakat Sipil untuk Sidang Ekosob PBB.

Dalam rangka penguatan AICHR, INFID ikut berpartisipasi pada serial pertemuan nasional dan regional konsolidasi masyarakat sipil ASEAN. Pertengahan Oktober

2014, INFID hadir dalam diskusi panel mengenai penguatan Komisi HAM ASEAN di *The 3rd International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia*, Kuala Lumpur.

Menjelang pertemuan BDF 2014, INFID menghadiri pertemuan *Civil Society Forum* di Bali pada 7 November 2014. Peserta yang hadir berasal dari organisasi masyarakat sipil dan *think* di Asia Pasifik. INFID menyampaikan beberapa usulan, antara lain perlunya semua anggota BDF menjadi anggota OGP. INFID juga menyusun pernyataan bersama Asia Democracy Network (ADN) yang mendukung pemboikotan beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia atas BDF agar lebih terbuka dan partisipatif.

Pada pertemuan OGP Asia Pasifik di Bali, Mei 2014, INFID menjadi narasumber bersama Kepala UNDP Jakarta dan Ketua TII Bangladesh. INFID menyampaikan presentasi mengenai peran OGP yang berpotensi mencegah pembajakan elit.

Pada 19 November 2014, pertemuan OGP diadakan di Jakarta. Pada kesempatan itu, INFID menjadi narasumber mengenai *Open Government*, bersama UKP4 dan perwakilan DPR. Pertemuan itu ditujukan untuk mengkonsolidasikan jaringan organisasi masyarakat sipil di Jakarta dan beberapa daerah, yang bekerja dalam berbagai isu seperti antikorupsi, transparansi anggaran, akses informasi, hingga pelayanan publik.

Di akhir bulan yang sama, INFID berpartisipasi dalam lokakarya OGP di Papua Nugini. INFID hadir sebagai anggota *Steering Committee* OGP. Bersama perwakilan Transparency International Indonesia (TII) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), INFID menjadi narasumber dalam lokakarya yang bertujuan mendorong organisasi masyarakat sipil dan pemerintah Papua Nugini menjadi anggota OGP. Lokakarya diikuti lebih dari tiga puluh orang dari kelompok masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pemerintah Papua Nugini. Kegiatan itu ditutup oleh Menteri Luar Negeri Papua Nugini dan menghasilkan beberapa rencana aksi dan janji pemerintah Papua Nugini untuk mengirim surat resmi aplikasi keanggotaan.

INFID juga menghadiri pertemuan ADN di Bangkok pada Februari 2014. ADN merupakan ruang menjalin solidaritas masyarakat sipil global dalam memperbaiki

situasi demokrasi di skala regional. Dalam pertemuan ini, INFID menyajikan presentasi mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan pelaksanaan OGP. INFID diberi tugas untuk membuka kontak dan kerjasama dengan BDF. Lima bulan kemudian, INFID menghadiri Konferensi Solidaritas Internasional untuk Thailand Manila, Filipina. Acara ini diadakan oleh ADN sebagai respon dan solidaritas masyarakat sipil Asia mengenai kudeta militer Thailand dan masa depan demokrasi di Thailand.

Highlight Program Demokrasi dan HAM

Pertemuan BRICSAM

Sebuah pendekatan baru dalam pemenuhan HAM di perkotaan/kabupaten. Kegiatan ini sebagai wadah *stakeholders* untuk memperkenalkan dan mendesain kota ramah HAM di Indonesia maupun mancanegara. Dihadiri sekitar 150 orang yang terdiri dari kepala daerah di Indonesia dan luar negeri, para ahli perkotaan, dan advokat HAM. HRC menghasilkan usulan mengenai kriteria dan indikator dalam mengimplementasikan pemenuhan HAM dalam sebuah kabupaten/kota.

D. Kegiatan Pendukung

Selain berfokus pada tiga program yang telah diuraikan sebelumnya, INFID juga melakukan beragam kegiatan non program. Semua kegiatan ini guna mendukung pencapaian advokasi INFID dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, pencapaian MDGs dan agenda pembangunan Pasca-2015, serta pemenuhan HAM dan demokrasi.

Pada 2 September 2014, INFID mengadakan dialog masyarakat sipil mengenai bisnis dan HAM di level internasional. Dialog ini bertujuan untuk mendiskusikan urgensi dan relevansi serta perkembangan mutakhir "*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*" di PBB, juga perkembangannya di ASEAN. Selain itu juga merumuskan pokok-pokok implikasi kebijakan dan implikasi hukum sebagai dasar untuk memikirkan kerangka dan rencana kerja bersama masyarakat sipil Indonesia dalam advokasi bisnis dan HAM, baik di tingkat nasional, regional atau internasional.

Kegiatan lain yaitu pertemuan mitra ICCO di Jakarta, pada 10 Desember 2014. Kerjasama antara ICCO dengan IBCSD (*Indonesia Business Council On Sustainable Development*). INFID menjadi pembicara dalam diskusi bertema "*Business and*

Human Rights". Pada kesempatan itu, INFID menyampaikan presentasi mengenai inisiatif *Human Rights Cities* yang sedang dikerjakan dan juga rencana menyusun rencana aksi nasional bisnis dan Hak Asasi Manusia. Narasumber lain bersama INFID adalah wakil KADIN dan wakil dari UNICEF.

INFID juga mengikuti kegiatan "Lokakarya Mitra ICCO Cooperation" mengenai HAM dan bencana, pada 22-24 September 2014 di Yogyakarta. Pada 19-21 Mei 2014, INFID menghadiri *Council Meeting of the International Forum of National NGO Platforms* (IFP) di London. Forum ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dan kerjasama antar platform CSO nasional dan aktor-aktor lain dalam pembangunan global.

E. Penguatan Kelembagaan

Selain aspek Program, INFID selama tahun 2014 juga melakukan aspek penguatan kelembagaan sebagai implementasi mandat konferensi INFID tahun 2008. Aspek kelembagaan ini meliputi dua aspek utama, yaitu:

a. Personil

Selama tahun 2014, INFID melakukan rekrutmen staf yang terbagi menjadi staf permanen, staf program jangka pendek dan magang. Staf permanen direkrut sebagai pergantian terhadap staf keuangan lembaga yang tidak memperpanjang kontrak kerjanya, staf program jangka pendek ditujukan untuk membantu persiapan dan pelaksanaan agenda besar INFID seperti konferensi dan sidang umum INFID serta Konferensi Human Rights Cities. INFID juga merekrut staf yang bertugas sebagai asisten program Post 2015 Development Agenda.

Selain rekrutmen, INFID juga mengikutsertakan stafnya untuk ikut dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Jaringan dan Mitra Kerja INFID. Pelatihan yang diikuti antara lain pelatihan advokasi, pelatihan pengurangan resiko bencana dan pelatihan *Inclusive Business*.

b. Sistem Keuangan

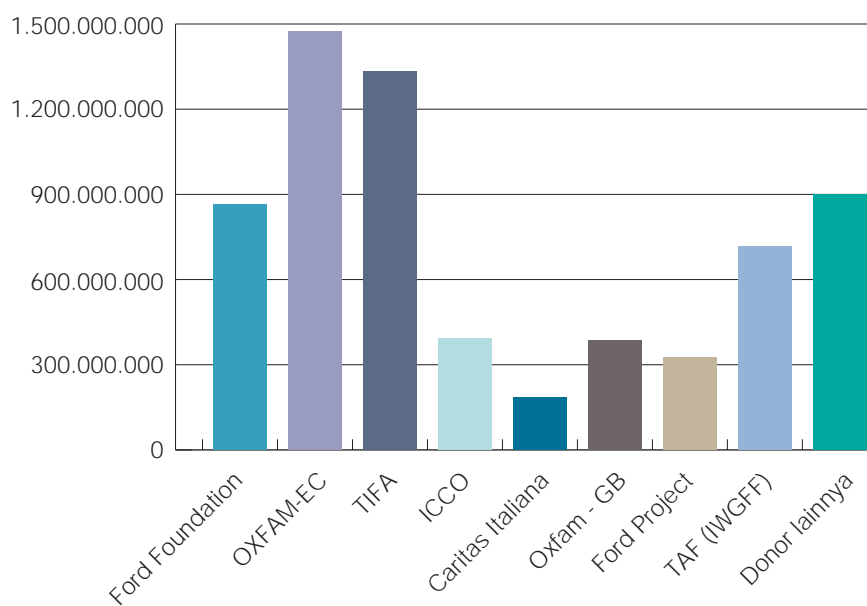
Penguatan sistem keuangan INFID dilakukan melalui pelatihan software system keuangan serta upgrade system akuntansi keuangan. Diharapkan dengan upgrade system keuangan, INFID bisa melakukan monitoring internal lembaga dan memberikan bahan laporan keuangan untuk diaudit lewat kantor akuntan publik.

BAB 3 | LAPORAN KEUANGAN

A. Lembaga

Sumber-sumber dana Per November 2014

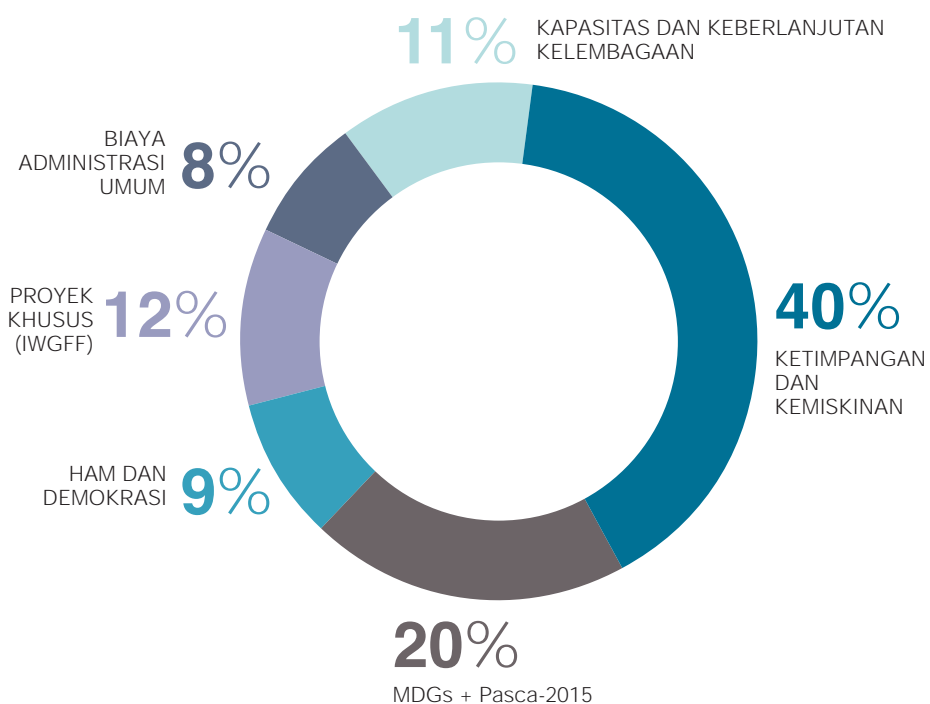
No.	Donor	Jumlah (Rp)
1	Ford Foundation	863,446,870
2	OXFAM-EC	1,475,169,291
3	TIFA	1,332,459,310
4	ICCO	392,353,200
5	Oxfam - GB	183,782,418
6	Caritas Italiana	386,049,786
7	Ford Project	325,490,270
8	TAF (IWGFF)	717,348,213
9	Donor Lainnya	898,378,840
TOTAL Pemasukan		6,574,478,198



B. Program

Biaya setiap Program per November 2014

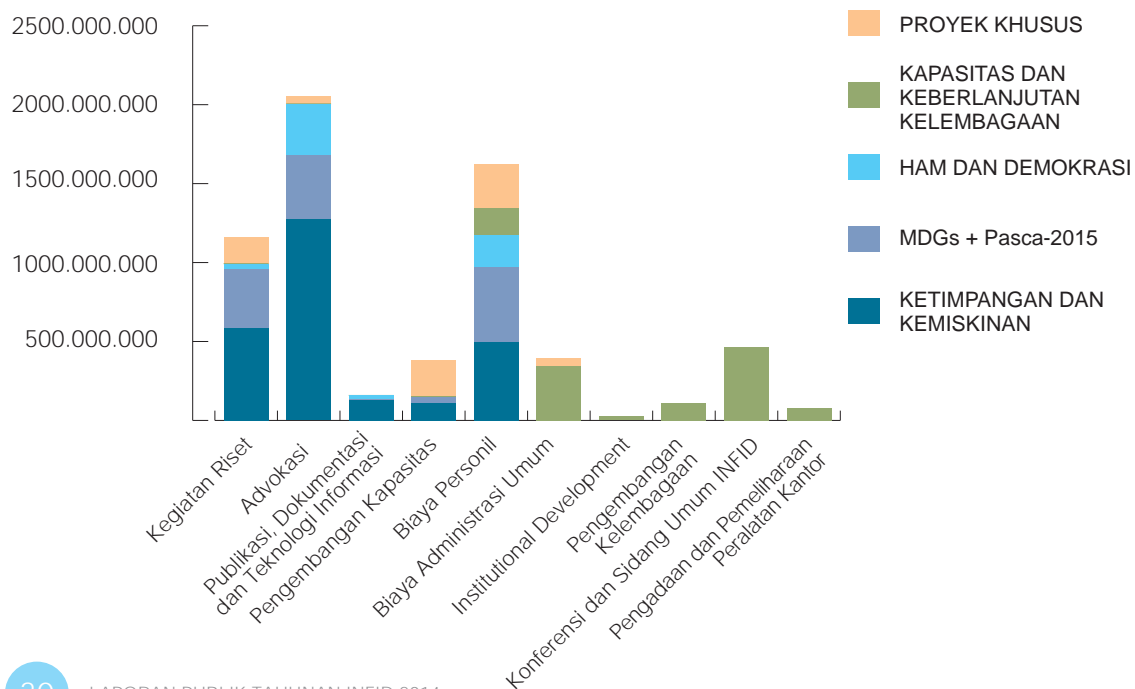
No.	KEGIATAN / PROGRAM	JUMLAH (Rp)	%
1	KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN	2,604,132,635	40%
2	MDGs + Pasca-2015	1,294,886,485	20%
3	HAM DAN DEMOKRASI	582,052,280	9%
4	KAPASITAS DAN KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN	679,890,700	11%
5	BIAYA ADMINISTRASI UMUM	516,097,140	8%
6	PROYEK KHUSUS (IWGFF)	775,820,658	12%
		6,452,879,898	100%



KEGIATAN PER PROGRAM

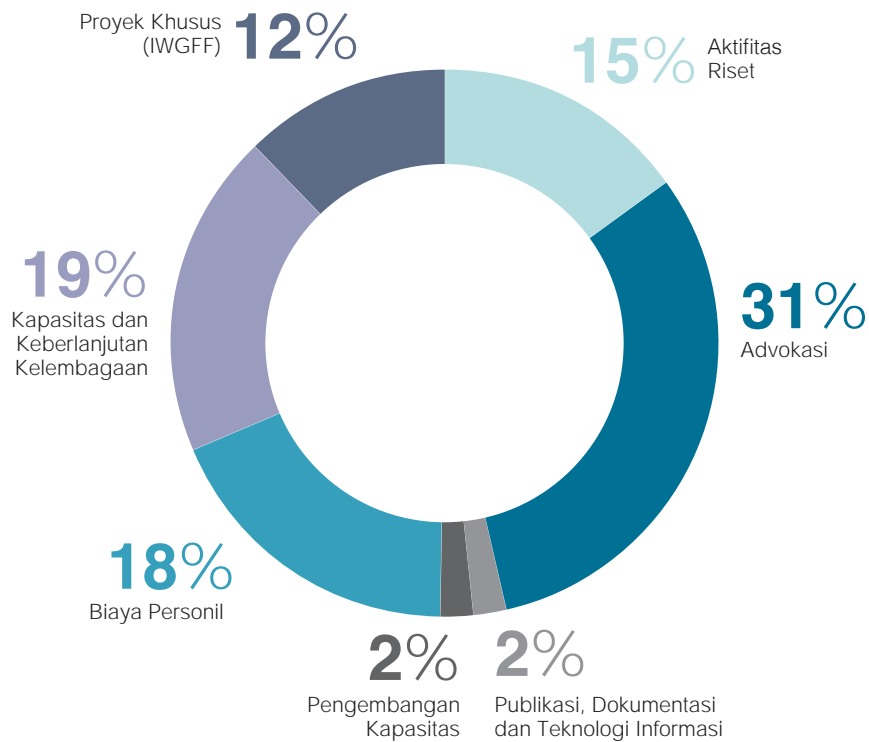
No	AKTIVITAS	KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN	MDGs + Pasca-2015	HAM DAN DEMOKRASI	KAPASITAS DAN KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN	PROYEK KHUSUS
1	Kegiatan Riset	587,464,965	373,224,145	32,390,000	0	171,501,300
2	Advokasi	1,273,303,488	405,037,375	326,949,030	0	46,067,800
3	Publikasi, Dokumentasi dan Teknologi Informasi	129,802,300	5,915,000	22,513,250	0	-
4	Pengembangan Kapasitas	113,652,955	35,937,965	-	1,050,000	231,233,800
5	Biaya Personil	499,908,927	474,772,000	200,200,000	169,054,004	281,125,000
6	Biaya Administrasi Umum				347,043,136	45,892,758
7	Pengembangan Kelembagaan				25,750,000	
8	Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi				110,290,000	
9	Konferensi dan Sidang Umum INFID				464,066,700	
10	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor				78,734,000	

Grafik Aktifitas per Program



Pengeluaran Program Per November 2014

No.	AKTIFITAS	Biaya	%
1	Aktifitas Riset	993,079,110	15%
2	Advokasi	2,005,289,893	31%
3	Publikasi, Dokumentasi dan Teknologi Informasi	158,230,550	2%
4	Pengembangan Kapasitas	149,590,920	2%
5	Biaya Personil	1,174,880,927	18%
6	Kapasitas dan Keberlanjutan Kelembagaan	1,195,987,840	19%
7	Proyek Khusus (IWGFF)	775,820,658	12%
Total		6,452,879,898	100%





BAB 4 | PENUTUP



Penyusunan Buku Laporan Tahunan INFID 2014 dimaksudkan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran INFID sesuai tugas dan fungsinya. Capaian kinerja tahun anggaran 2014 diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk merancang program kegiatan pada 2015.

Upaya menjaga kesinambungan program menjadi agenda penting yang harus dilakukan INFID guna mendorong percepatan terwujudnya sejumlah tema advokasi yang sedang dilakukan, seperti advokasi anti ketimpangan, penyusunan agenda Pasca-2015, serta advokasi hak asasi manusia dan demokrasi.

Meskipun pencapaian kinerja tahun 2014 cukup baik, namun tantangan yang dihadapi INFID semakin berat sehingga diperlukan program terobosan yang dinamis dan inovatif, guna mengantisipasi setiap perubahan yang berkembang di lingkungan global, nasional, maupun lokal.

Terlebih lagi tantangan akibat krisis ekonomi yang berdampak pada menurunnya dukungan pendanaan kepada negara emerging seperti Indonesia. Pendanaan resmi dari pemerintah kepada swasta yang sama-sama diakui sebagai aktor pembangunan juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Tantangan lainnya seperti adanya undang-undang yang membatasi aktivitas masyarakat sipil dan ancaman dari kelompok fundamentalis. Keberlanjutan organisasi masyarakat sipil yang kesulitan dalam hal regenerasi dituntut untuk memperkuat kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan secara regular.

Demikian pula upaya mempertahankan berbagai capaian program dan advokasi yang telah diraih INFID, maupun penghargaan dari mitra dan jaringan kerja. Oleh karena itu, membangun jaringan dan dukungan dari pemangku kepentingan juga sangat diperlukan.

LAMPIRAN

Daftar Kegiatan MDGs dan Post-2015 Development Agenda

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	3 Januari 2014	Dialog Kebijakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015 dengan kementerian Luar Negeri dan Bappenas. Kegiatan ini dilakukan beberapa kali.
2.	18 Januari 2014	Konferensi Pers "Kebijakan Pajak di Indonesia".
3.	Januari 2014	Penyusunan Analisa INFID tentang Ketimpangan, Pajak dan Hak Asasi Manusia.
4.	1-7 Februari 2014	Pertemuan OWG on SDGs ke-8 di New York, <i>side event</i> KUKPRI dan UKP4, pertemuan informal dengan HRW dan Duta Besar Indonesia untuk PBB.
5.	Februari 2014	Penyusunan Rekomendasi CSO Indonesia untuk OWG on SDGs.
6.	4 Maret 2014	Konferensi Pers "Ketimpangan Ekonomi" untuk mendorong agar ketimpangan ekonomi menjadi prioritas calon presiden Indonesia.
7.	Maret 2014	INFID terpilih menjadi salah satu anggota <i>Executive Committee Beyond2015</i> .
8.	Maret dan April 2014	Forum Konsultasi Publik RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 di Makassar, Medan, dan Jakarta.
9.	Maret-Mei 2014	Riset "Praktek Diskriminasi dan Suara Kelompok Rentan dalam Pembangunan".
10.	April 2014	Finalisasi penyusunan Indeks Barometer Sosial 2013.
11.	18-19 Juni 2014	Konsultasi Nasional " <i>Partnerships with Civil Society and Other Actors</i> ".
12.	Juni 2014	Seminar Publik Penelitian "Praktek Diskriminasi dan Suara Kelompok Rentan dalam Pembangunan" di Yogyakarta, Semarang, Balikpapan dan Bandung.
13.	Juni 2014	Kampanye <i>iMove againts "Inequality, Insecurity, Injustice"</i> untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan pasca2015.

No.	Tanggal	Kegiatan
14.	Juli 2014	Penyusunan dokumen <i>Advocacy Toolkit</i> Pembangunan Pasca-2015.
15.	Agustus 2014	Penyusunan dokumen "Profile INFID".
16.	2 September 2014	<i>Expert Meeting</i> "Memikirkan Tujuan Akses Terhadap Keadilan dan Tata Kelola dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015" di Jakarta.
17.	19-28 September 2014	Pertemuan Sidang Umum PBB ke-69 di New York dan menggelar <i>side event</i> dengan Beyond 2015, ADA, KUKPRI MDGs, TIFA, OSF.
18.	20-21 Oktober 2014	Pertemuan Global "Partnership with Civil Society" di Siem Reap, Kamboja.
19.	13-14 November 2014	Konferensi Beyond 2015 di Kopenhagen, Denmark.
20.	November 2014	Kelompok Kerja Governance dan Akses terhadap Keadilan.
21.	November 2014	Penyusunan RPJMN versi CSO.

Daftar Kegiatan Kemiskinan & Ketimpangan

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	10-14 Februari 2014	Dialog Kebijakan dan Pelatihan Advokasi untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan jaringan INFID terkait advokasi menurunkan ketimpangan. Kegiatan berlangsung di Yogyakarta, dihadiri anggota dan jaringan INFID dari seluruh Indonesia
2.	18 Maret 2014	Tiga rangkaian kegiatan sekaligus di Malang, meliputi media gathering mengenai <i>Pembangunan Manusia dan Ketimpangan di Indonesia</i> , Radio talkshow dan seminar dengan tema yang sama, serta koordinasi dengan masyarakat sipil.
3.	27 Maret 2014	Seminar Publik "Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia" di Jakarta. Seminar ini merupakan bagian dari penelitian INFID bekerja sama dengan LIPI.
4.	23 April 2014	Diskusi dengan tema "G20 dan Jebakan Negara Berpendapatan Menengah" di Jakarta.
5.	5 Juni 2014	Dialog kebijakan dengan pemerintah meliputi BAPPENAS, Kementerian Keuangan, KPK mengulas perkembangan G20 dari perspektif pemerintah dan masyarakat sipil.

No.	Tanggal	Kegiatan
6.	20-21 Juni 2014	Menghadiri Civil 20 Melbourne, Australia sekaligus mendiskusikan hasil-hasil Civil20 di Jakarta.
7.	25 Juni 2014	Workshop advokasi di Jakarta dengan narasumber dari InterAction, sebuah forum masyarakat sipil yang berbasis di AS.
8.	21 Agustus 2014	Halal Bihalal dan Peluncuran Buku "Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek" di Jakarta.
9.	18 September 2014	Diskusi dengan tema G20 dan Tantangan Pemerintahan Baru, untuk mengidentifikasi prioritas agenda luar negeri pemerintahan Jokowi-JK, terutama di Fora G20.
10.	25 September 2014	Menghadiri Sidang Umum PBB mengenai MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-2015. INFID bersama jaringan masyarakat sipil internasional mengusung Ketimpangan di Bidang Kesehatan.
11.	26 September 2014	Diskusi mengenai kemajuan Perempuan di dalam Pembangunan. Diskusi bertujuan untuk mengidentifikasi peran INFID di tema Perempuan dan Ketimpangan, juga untuk membangun sinergi dengan organisasi perempuan lainnya.
12.	12 Oktober 2014	Konferensi pers bersama Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri, dengan memberi catatan terhadap 10 tahun kebijakan luar negeri pemerintahan SBY.
13.	15-16 Oktober 2014	Konferensi dan General Assembly Meeting INFID dengan tema "Re-demokratisasi Ekonomi, Sosial dan Politik". Konferensi diadakan di Jakarta dengan menghadirkan berbagai narasumber mulai dari masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan pemerintah.
14.	30 Oktober 2014	Radio Talkshow INFID dengan Radio 68H Merespon Arsitektur Kabinet Jokowi-JK: Postur Kabinet untuk Politik Luar Negeri Indonesia.
15.	5-12 November 2014	Mengikuti peer to peer visit dimana INFID datang ke negeri Tiongkok untuk mengetahui kondisi ketimpangan di Tiongkok dan peran masyarakat sipil.
16.	15 November 2014	Peluncuran Buku "Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek" di Makassar, Sulawesi Selatan. Diskusi diadakan dengan kerjasama dengan anggota INFID yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan.

No.	Tanggal	Kegiatan
17.	25-26 November 2014	Bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung di dalam Indonesia Beragam mengadakan <i>Feminist Conversation</i> . Kegiatan diadakan di Jakarta dan dihadiri berbagai organisasi baik yang berasal dari Jakarta maupun dari daerah lain.
18.	10 Desember 2014	Diskusi dengan tema "Perempuan dan Ketimpangan di dalam Sistem Ketenagakerjaan: Menggali Sebab dan Solusi Kebijakan". Diskusi diadakan di Yogyakarta bersamaan dengan Kongres Koalisi Perempuan Indonesia.
19.	18 Desember 2014	Radio Talkshow dengan tema "Hak Perempuan Mendapat Pekerjaan yang Layak: Upaya menurunkan Ketimpangan Perempuan di dalam sistem Ketenagakerjaan".

Daftar Kegiatan HAM dan Demokrasi

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	Februari	Partisipasi INFID di ADN meeting, Bangkok. Merumuskan intervensi dan advokasi ke ASEAN, BDF dan Open Government Partnership.
2.	Maret	Partisipasi INFID pada Asean People Forum/APF dalam rangka KTT ASEAN di Myanmar Maret 2014
3.	April	Laporan Bayangan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Sidang Ekosob PBB.
4.	April	Kehadiran dan intervensi INFID dalam sidang Komite EKOSOB PBB
5.	April	Surat bersama CSO ASEAN ke AICHR
6.	Mei	Partisipasi dan perluasan jaringan dalam <i>World Human Rights Cities Forum</i> .
7.	Mei	Siaran pers dan jumpa pers terkait dengan hasil kesimpulan Komite EKOSOB PBB atas sidang Indonesia.
8.	Juni	Serial Pertemuan Nasional dan Regional Konsolidasi Masyarakat Sipil ASEAN untuk Penguatan AICHR.

No.	Tanggal	Kegiatan
9.	Juli	Surat dan statement bersama CSO ASEAN ke AICHR
10	Agustus	Publikasi "Apa Kabar Pembangunan Manusia di Indonesia: Catatan dari Empat Daerah".
11.	September	Jumpa pers dan Dialog dengan Tim Transisi Presiden mengenai Agenda Pemenuhan HAM Pemerintahan yang baru.
12.	Oktober	Diskusi Panel Mengenai Penguatan Komisi HAM ASEAN dalam <i>The 3rd International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia</i> .
13.	September	Pertemuan <i>Expert Meeting</i> Mengenai Bisnis dan HAM.
14.	Oktober	Pertemuan Nasional Mengenai Bisnis dan HAM dalam Konferensi INFID.
15.	November	Partisipasi dan dialog dalam <i>Bali Democracy Forum</i> . Partisipasi dan perluasan jaringan dalam <i>Asia Democracy Network</i>
16.	November	Publikasi <i>working paper</i> "Agenda Pemenuhan HAM Presiden Baru".
17.	Desember	Konferensi Nasional <i>Human Rights Cities</i> .
18.	Maret-Desember	Asistensi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyusun Peraturan Daerah Mengenai Kabupaten Ramah HAM.

Daftar Mitra Kerja INFID

Mitra Kerja / Lembaga Dana

1. Ford Foundation
2. Oxfam-EC
3. Tifa
4. ICCO
5. Oxfam-GB
6. Caritas Italiana
7. Ford Project
8. TAF (IWGFF)

Ucapan Terimakasih

(yang telah berkenan menjadi pembimbing, narasumber, memberikan pidato kunci, peneliti, peer reviewer dan editor bahasa dan dukungan lainnya)

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Abdul Waidl | 37. Esther Parapak | 73. Nindi Sitepu |
| 2. Abetnego Tarigan | 38. Fabby Tumiwa | 74. Nur Iman Subono |
| 3. Adyani | 39. Fajar Luhur Amarta | 75. Dida Heryadi Salya |
| 4. Agung Wicaksono | 40. Fajrimei Ghofar (Jimmy) | 76. Panca Pramudya |
| 5. Ah Matftuchan | 41. Farah Sofia | 77. Pandu |
| 6. Ahmad Faisol | 42. Ganjar Pranowo | 78. Poengky Indarti |
| 7. Ahmad Qisai | 43. Haris Azhar | 79. Rafendi Djamin |
| 8. Ainun Chomsun | 44. Hasan Kleib | 80. Ratna Yunita |
| 9. Alexander Irwan | 45. Herryadi | 81. Reza |
| 10. Alfindra Primadi | 46. Hilman Handoni | 82. Risnawati Utami |
| 11. Alvon Kurnia Palma | 47. Hilmar Farid | 83. Riza Damanik |
| 12. Angga Dwimarta | 48. Ichal Supriadi | 84. Roy Abimanyu |
| 13. Anselmo Lee | 49. Ilham Saenong | 85. Setyo Budiantoro |
| 14. Antarini Arna | 50. Indi Hikami | 86. Soo Yon Suh |
| 15. Arie Sujito | 51. Irene Gayatri | 87. Stuart Bruce |
| 16. Arief Anshory | 52. Irhaz Ahmadi | 88. Suryati Simanjuntak |
| 17. Arif Budimanta | 53. Iwan Nurdin | 89. Sutoro Eko |
| 18. Atnike Sigiro | 54. J Prastowo | 90. Tanti Budi Suryani |
| 19. Bagus Takwin | 55. JW Junardi | 91. Tara Hidayat |
| 20. Bambang Brojonegoro | 56. Khofifah Indarparawansa | 92. Thomas Dunnmore |
| 21. Bambang Prijambodo | 57. Kholiq Arief | 93. Toffery Primanda |
| 22. H. M. Nurdin Abdullah | 58. Kiswara | 94. Victoria Fanggaldae |
| 23. Abdullah Azwar Anas | 59. Kuntoro Mangkusubroto | 95. Wahyu Susilo |
| 24. Chris Wangkay | 60. Leo Williams | 96. Wahyudi Jaffar |
| 25. Dadang Trisasongko | 61. Lukita Dinarsyah Tuwo | 97. Bima Arya |
| 26. Dana Hasibuan | 62. Magda Elene Toma | 98. Ilham Arief Sirajuddin |
| 27. Danang Widoyoko | 63. Marco Kusumawijaya | 99. Wicaksono Sarosa |
| 28. Darmawan Triwibowo | 64. Maria Ulfah | 100. Yanuar Nugroho |
| 29. Denny Abdi | 65. Mariano Donatis | 101. Yenny Wahid |
| 30. Desra Percaya | 66. Marsen Sinaga | 102. Zaerudy |
| 31. Diah Saminarsih | 67. Matteo Amigoni | 103. Zumrotin K Susilo |
| 32. Dian Kartikasari | 68. Michael B Hoelman | 104. Dan nama-nama lain |
| 33. Diana Gultom | 69. Missiah | yang tidak dapat disebut |
| 34. Dini Widiastuti | 70. Mohammad Firdaus | karena keterbatasan |
| 35. Dwi Ruby Kholifah | 71. Morenk Blado | halaman |
| 36. Erani Yustika | 72. Nila Moeloek, | |





infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540 - Indonesia

Phone: (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497

Fax: (62-21) 7884 4703

E-mail: infid@infid.org

www.infid.org